

# Dinamika Islam Singapura: Menelisik Pengalaman Minoritas Muslim di Negara Singapura yang Sekular & Multikultural

Oleh: Helmiati<sup>1</sup>

## Abstract

### *The Dynamics of Islam Singapore Probe of Muslim Minority Experience in Singapore Secular & Multicultural*

*This article tries to study about how Muslim minority of Singapore have reconciled Islamic teachings with the unique challenges of their days. As we know, they live in a plural society, secular state, and globalised modern world. There are many challenges. Nevertheless, their experiences show how they practise Islam with relative ease; how they seek to harmonise religious teachings with their unique circumstances successfully; and how they take care of the Islamic civilization well. Indeed, the external factors, such as the geopolitical situation and social realities such as the process of modernisation, strongly influence and shape the way they understand and practice Islam. However, It shows that Islam remains compatible with any condition, including with the process of modernisation as long as the practice of the religion remains guided by its fundamental principles. Even, in the context of modernisation, Islam plays it's role as spiritual bodyguard toward the bitterness of development. Further, Muslim Minority of Singapore's experiences strengthen Gellner's statement that "Islam is the great exception to secularization".*

**Keyword:** Islam, Moslem, Singapore, Secular and Multicultural

## Minoritas Muslim di Tengah Kehidupan Plural & Sekular

*Here is a society that is very determined to be a secular state, But one that is deeply diverse in religion and ethnicity, And in order to achive that secular goal it must manage its religious hinterland* (Kamaludeen Mohamed Nasir, 2010: 2).

Muslim Singapura—secara politis—tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural dan multi-kultural (Suzaina Kadir, 2004). Sejak kolonisasi Inggris, keragaman etnis, budaya, dan agama semakin tampak jelas di negara ini sebagai konsekuensi dari lajunya arus migrasi terutama dari etnis Cina (Hefner, 2001). Selain itu, arus modernisasi dan pembangunan yang begitu pesat serta ekonomi global modern yang berlangsung di negara ini memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab lajunya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai belahan dunia ke negara ini, sehingga semakin menambah keragaman etnis, budaya, dan agama (pluralitas dan multi-kultural) warga Singapura sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1:** Persentase jumlah penduduk Singapura berdasarkan etnis

No.	Etnis	Persentase
1.	Cina	74.1
2.	Melayu	13.4
3.	India	9.2
4.	Pakistan, Arab, dll.	3.3

**Tabel 2:** Jumlah penduduk Singapura berdasarkan pemeluk agama

No.	Pemeluk agama	Persentase
1.	Budha	33
2.	Kristen	18
3.	Tanpa agama	17
4.	Islam	15
5.	Taois & Kong Hu Cu	11
6.	Hindu	5.1
7.	Lain-lain	0.9

Sumber: Singapore Department of Statistics, Pers Release: Census of population 2010: Statistical Release on Demographic Characteristics, Education, Language and Religion.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Muslim hanya 15 persen dari seluruh jumlah penduduk, di mana sekitar 13,4 persen di antaranya adalah etnis Melayu, dan lain-lain sisanya.

Selain itu, bila dilihat dari hubungan negara dan agama, Singapura dikenal sebagai negara sekular, di mana negara menjadi netral dalam permasalahan agama; tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama (Madeley dan Zsolt Enyedi, 2003). Agama menjadi urusan pribadi, pemerintah tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Sekularisme Singapura ini ditegaskan oleh Kamaludeen, *Here is a society that is determined to be a secular state...* Hal yang sama juga disampaikan oleh George Yeo, menteri informasi, komunikasi dan seni: “*Singapore ‘s government is secular, but it is certainly not atheistic*” (Lily Zubaidah Rahim, 2009: 2). Pandangan ini menggambarkan tentang paham sekularisme strategis pemerintah, yang menegaskan bahwa sekular bukan berarti atheis (tidak bertuhan) karena faktanya lebih dari 80% penduduk Singapura menganut agama tertentu.

Paham sekularisme pemerintah berimplikasi pada beberapa kebijakan. Misalnya, suara azan yang berfungsi sebagai pengingat dan pemanggil Muslim untuk mendirikan shalat, tidak boleh dikumandangkan melalui *loud speaker*. Alasannya adalah agar non-Muslim yang mayoritas tidak terganggu. Contoh lain dapat ditunjukkan dari pelarangan memakai jilbab bagi siswi Muslim di sekolah-sekolah pemerintah. Seperti ditegaskan oleh, PM, Lee Hsien Loong, kepada warga Muslim; “*Hijab was not part of the school uniforms and effectively banned in institutions of learning*. Saat diwawancarai oleh Berita Harian, *Malay Newspaper*, putra Lee Kuan Yew itu kembali menegaskan bahwa pelarangan jilbab dimaksudkan untuk memelihara integrasi dan keharmonisan sosial. Jilbab dipandang sebagai simbol agama tertentu. Mengizinkan Muslimah memakai jilbab di sekolah akan mengganggu integrasi nasional, karena akan memunculkan persoalan di kalangan siswa lainnya. Larangan yang sama juga dulu pernah diberlakukan kepada para pegawai Muslimah saat mereka bekerja di lembaga-lembaga pemerintah seperti rumah sakit, klinik dan sebagainya (<http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh pada tanggal 3 September 2013).

Seperti di negara-negara sekular lainnya, kebijakan pemerintah relatif kurang memperhatikan implikasinya pada pengamalan dan penegakan syiar Islam. Hal ini dapat dibuktikan dari kebijakan terkait penataan tempat tinggal (*New Strait Settelement*) (Helmiati, 2011: 212; Hooker, 1998: 170). Karena lajunya arus urbanisasi dan migrasi global, pemerintah telah membangun rumah susun (*flat*) dan mewajibkan seluruh rakyat, termasuk warga Muslim untuk tinggal di perumahan yang telah disediakan pemerintah, dengan mengintegrasikan secara proporsional warga yang terdiri dari etnik Cina, India, Melayu, dan sebagainya. Kebijakan ini punya dampak yang besar, khususnya bagi Melayu-Muslim. Mereka yang semula tinggal di kampung tradisional yang homogen dan dapat menikmati kebersamaan dalam menjalankan agama, sekarang jadi tinggal terpencar ke tempat tinggal modern yang terdiri dari berbagai etnik dan agama. Mereka tidak lagi homogen tetapi mesti membaur dengan etnik dan pemeluk agama lainnya. Posisi minoritas kaum Muslim di apartemen-apartemen yang disediakan pemerintah tersebut tidak mendorong terjadinya perhimpunan-perhimpunan keagamaan seperti ketika dulu mereka hidup secara homogen. Mereka yang terbiasa melaksanakan ajaran agama secara berjama'ah, saling tolong dan dapat saling mempererat *silaturrahmi*, sekarang dengan kebijakan itu menjadi terpencar dan terpecah dari jama'ah yang dulu terbentuk secara alami. Konsekuensinya syiar Islam terasa makin lemah.

### **Negara Singapura yang Maju dan Modern**

Dalam sejarahnya, terutama pada abad ke-19 M. Singapura pernah menjadi satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh (Weyland: 219-254). Selain sebagai transit perdagangan, posisinya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa kesultanan Malaka (sebelum kedatangan kolonial Eropa), masa kolonial, sampai pada awal abad ke-20 (Azyumardi Azra, 1994: 203, 271). Peran penting tersebut perlahan-lahan berakhir ketika kekuasaan kolonial semakin kokoh, dan terus berlanjut ketika pada akhirnya Singapura memisahkan diri dari negara federasi Malaysia dan menjadi negara republik yang merdeka pada tahun 1965; umat Islam menjadi minoritas, selanjutnya komunitas

Muslim yang sebagian besar adalah bangsa Melayu menempati posisi kelas dua di bawah etnis Cina (Suriani Suratman, 2004: 4).

Saat ini Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia (*a first world economic power*) (Singapore Economic Development Board, 2012) dengan pertumbuhan ekonomi yang amat pesat dan jaringan perdagangan yang luas serta memiliki kekuatan militer, pertahanan dan intelijen yang kuat. Dalam bidang ekonomi, negara ini dinobatkan oleh *World Bank* (2012) sebagai *the first competitiveness and Business environment*. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup penduduk terbaik di Asia, dan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yang menyamai negara-negara kaya di Eropa Barat (Lily Zubaidah Rahim, 1999: 2). *The World Economic Forum* (2012) yang berkedudukan di Swiss menobatkan Singapura sebagai negara kedua setelah Switzerland dalam kompetisi ekonomi tertinggi di dunia dengan keunggulan-keunggulannya di berbagai bidang. Pujian juga datang dari *Economic Intelligence Unit* yang menegaskan Singapura sebagai satu dari sepuluh negara dunia yang memegang kendali bisnis global (Rizki Ridyasmara, 2005: 37). Pelabuhannya menjadi pelabuhan tersibuk di dunia. Demikian juga bandar udaranya yang mampu melayani sekurangnya 67 maskapai penerbangan komersial.

Sektor pendidikannya dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ahli sesuai kebutuhan pasar ekonomi global. Seorang warga Singapura yang sempat penulis wawancarai mengatakan:

“Mereka (baca:pemerintah) sangat tahu apa yang akan mereka raih sehingga tidak segan-segan merekrut orang-orang yang cerdas dari berbagai negara termasuk Indonesia. Anak-anak cerdas itu disekolahkan dan diberi beasiswa penuh dengan catatan bekerja untuk Singapura setelah menyelesaikan studinya. Gaji yang tinggi dengan segala fasilitas kehidupan yang mapan, telah membuat banyak orang cerdas mengabdikan pada negara kecil yang menjadi pusat begitu banyak industri dunia tersebut”.

Karena itu tak mengherankan bila Singapura termasuk sepuluh besar negara yang memiliki tenaga kerja yang berkualitas di Asia (*Top 10 in Asia for best skilled labour*) (IMD, 2013).

Keberhasilan Singapura lainnya terlihat dari kemampuannya memperluas wilayah dengan cara mereklamasi garis pantainya (<http://nhytatakky>.

[wordpress.com/201105/06/Geopolitik-geostrategi-singapura](http://wordpress.com/201105/06/Geopolitik-geostrategi-singapura)). Kecanggihan teknologi yang mereka miliki dan ketersediaan dana yang besar serta ladang pasir yang diambil dari pulau-pulau yang tak berpenghuni milik Indonesia. Selain itu, gedung-gedung yang megah dan penataan kota yang indah memberi kesan dan pesona bagi wisatawan.

## Pengamalan dan Penegakan Syi'ar Islam di Tengah Pluralitas

Masyarakat plural dan multikultural ditandai oleh keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat. Perbedaan etnis, agama, pola pikir, warna kulit, dan bahasa adalah contoh-contoh keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Seperti dikemukakan oleh Furnival (1994), *plural society is a society that comprise two or more elements or social orders which live side by side, yet without mingling in one political unit*. Kondisi semacam ini pula yang terdapat di negara Singapura sebagai dampak migrasi global (Tourres, 2003), seperti digambarkan oleh Kamaludeen (2010): “*global migration makes modern societies more complex in terms of religion and ethnicity*”.

Tak dapat dipungkiri bahwa keanekaragaman dan perbedaan—termasuk perbedaan agama—menjadi salah satu pembatas antar warga dalam kehidupan sosial. Sepanjang sejarah, agama dapat memberi kontribusi positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama. Namun di sisi lain, agama juga dapat menjadi pemicu konflik antar masyarakat beragama bila tidak dapat mengelolanya dengan baik. Untuk itu, menurut Azyumardi Azra: “kehidupan multikultural memang mengharuskan adanya tolak angsur-toleransi dan kemampuan adaptasi dan integrasi dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi makna agama dan tradisi masyarakat tertentu.” (<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1574-muslim-dan-masyarakat-multikultural.html>.) Sikap seperti inilah yang dapat menciptakan harmoni dan kedamaian.

Secara historis, kehidupan multikultural bukanlah sesuatu yang baru bagi kaum Muslim. Sejak masa awal Islam dan lebih khusus lagi pada masa pasca *al-Khulafa al-Rasyidun*, pertumbuhan kaum Muslim yang begitu cepat di berbagai wilayah dunia sekaligus merupakan pertemuan yang melibatkan akomodasi dan konflik dengan realitas lokal yang berkat kehadiran Islam dan kaum Muslim juga kian

multikultural. Realitas ini terlihat kian jelas ketika kekuasaan politik yang melintasi berbagai wilayah budaya berada di tangan kaum Muslimin sejak Dinasti Umayyah, Abbasiyah di Baghdad dan Andalusia, Usmani, Moghul (Amin, 1975; Hasan, t.th.) dan seterusnya sampai ke Asia Tenggara.

Secara teologis, agama senantiasa mengajarkan toleransi, keadilan, perdamaian dan saling menghargai (*justice, peace and mutual respect*). Ini adalah etika universal yang merupakan bagian dari gagasan multikulturalisme. Etika tersebut merupakan nilai bersama, yang tidak hanya dimiliki oleh bangsa tertentu, tetapi juga merupakan nilai yang juga diakui dunia.

Pembangunan yang dilakukan Singapura selama 48 tahun menuju Singapura yang maju seperti saat ini memberikan perubahan besar pada gaya hidup masyarakat, termasuk kehidupan beragama. Karena itu, Muslim perlu memiliki kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan tersebut.

Pelaksanaan syiar Islam dan dinamikanya di Singapura tak dapat dipisahkan dari fungsi dan peran penting Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) sebagai lembaga tertinggi pemerintah untuk urusan agama Islam. Institusi yang setingkat kementerian agama di Indonesia ini didirikan sejak tanggal 1 Juli 1968 dan memiliki wewenang dan tanggung jawab atas seluruh aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan urusan peribadahan, hukum, perekonomian, kemasyarakatan, pendidikan, dan kebudayaan Islam. Lebih jelasnya, MUIS mempunyai tugas dan fungsi utama sebagaimana berikut:

1. Memberi saran kepada presiden dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam (<http://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>).
2. Mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum Muslimin, termasuk urusan haji dan sertifikasi halal.
3. Mengelola wakaf dan dana kaum Muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah.
4. Mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam, atau untuk kepentingan umat Islam.
5. Mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura.

Dalam praktiknya, badan resmi milik negara ini melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, memiliki wewenang terhadap kurikulum pendidikan agama, pernikahan, zakat, kurban, dan lain sebagainya. MUIS juga mengawasi khutbah Jumat di setiap masjid untuk memastikan isi khutbah sesuai dengan konsep negara Singapura yang majemuk. Para penceramah yang datang dari luar pun diwajibkan mengurus izin ceramah kepada MUIS, sebelum mereka bisa berceramah di Singapura.

MUIS yang menempati gedung megah di 273 Braddel Road, tepatnya di kompleks *Islamic Centre* Singapura juga mengeluarkan fatwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam Singapura. Selain itu, MUIS juga *concern* terhadap kehalalan sebuah produk atau sertifikasi halal. Kendati berada di negara yang cenderung sekular, masalah kehalalan suatu produk menjadi perhatian utama umat Islam Singapura. Tidak mengherankan jika sertifikasi produk halal ini secara formal telah dimulai sejak tahun 1978, lebih dahulu dibanding dengan Indonesia yang mayoritas Muslim. MUIS sendiri telah mengeluarkan lebih dari 2600 sertifikat halal yang menjadi jaminan kehalalan produk makanan untuk melayani warga Singapura yang memeluk Islam.

Di tengah sistem kehidupan sekular yang diterapkan pemerintah setempat, Muslim Singapura terus berpacu meningkatkan kualitas diri, agar mampu berkompetisi dan menyesuaikan diri dengan lajunya kemajuan teknologi informasi dan perubahan zaman. Sebagai contoh, meski pendidikan formal agama Islam di Singapura—secara umum—mengalami kemunduran, namun perhatian umum terhadap pendidikan Islam non-formal mengalami peningkatan. Banyak orang tua yang mengirimi anaknya ke sekolah pemerintah atau sekular untuk membekalinya dengan sains dan teknologi, namun tetap membekalinya dengan pengetahuan agama melalui pendidikan non-formal.

Pendidikan non-formal dapat diperoleh di masjid. Masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga difungsikan sebagai tempat belajar agama, pengembangan syiar Islam dan tempat pertemuan. Masjid Agung yang menampung sampai 2000 jamaah terletak di pusat kota Singapura, misalnya, menyelenggarakan pendidikan tingkat kanak-kanak, kursus/les untuk siswa kelas dasar dan menengah, kelas agama, bimbingan keluarga, kelas *leadership*



dan pengembangan masyarakat, serta pengajaran bahasa Arab.

Singkatnya, kondisi sosio kultural dan sistem politiknya telah mendorong Muslim Singapura untuk memaksimalkan fungsi institusi pendidikan non-formal seperti masjid, madrasah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menegakkan syiar Islam, mengembangkan pendidikan Islam, dan melestarikan peradaban Islam.

### ***Intensifikasi Fungsi Masjid***

Dewasa ini, masjid merupakan sebuah institusi strategis di Singapura. Masjid memiliki program terencana yang dibina oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Tidak seperti yang dipahami selama ini, bahwa masjid hanya sebatas tempat ibadah *an sich*. Di Singapura, masjid benar-benar berfungsi sebagaimana zaman Rasulullah, yaitu sebagai pusat kegiatan Islam yang diarahkan tidak hanya untuk aktivitas ibadah seperti shalat, baca al-Qur'an, dan wirid pengajian, tetapi juga berfungsi sebagai sentral pendidikan dan pembangunan sosial umat.

Masjid di Singapura pada umumnya tidak hanya memiliki ruang tempat shalat saja, tetapi dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk keperluan jemaah. Di ruas kanan dan kiri setiap masjid terdapat ruangan-ruangan kelas untuk belajar agama dan kursus keterampilan. Selain itu, juga terdapat fasilitas lainnya seperti ruang kantor administrasi atau sekretariat pengelolaan masjid, ruang sidang, ruang serba guna atau auditorium, ruang kelas untuk belajar, perpustakaan, kamar jenazah serta ruang untuk aktivitas dan program pembangunan sosial umat (Mohamed Ali Atan, 2005: 2; MUIS, 1986)).

Fungsi masjid semacam ini sesungguhnya telah berawal sejak zaman Rasulullah Saw. di mana masjid memiliki multi fungsi, tidak saja sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai markas untuk melakukan segala perancangan untuk kemajuan Islam dan umatnya.

Fungsi masjid lainnya adalah sebagai wadah untuk diskusi berbagai masalah kontemporer dan keislaman. Diskusi ini biasanya diadakan oleh organisasi remaja di setiap masjid. Dewan pengurus setiap masjid juga menerbitkan media (majalah dan buletin) sebagai media dakwah dan *ukhuwah* sesama Muslim. Berbeda dengan di negara lainnya, para pengurus masjid digaji khusus, dan memiliki ruangan pengurus eksekutif layaknya perkantoran modern.

Kebanyakan masjid memiliki aktivitas, kreativitas, dan pandangan jauh ke depan dalam memberikan layanan terhadap kebutuhan umat (Mohamed Ali Atan, 2005: 5). Masjid di Singapura telah memberikan banyak sumbangan dalam memenuhi keperluan sosial masyarakat Muslim di sana, terutamanya dalam membentuk kehidupan beragama umat. Setiap Muslim mendapat pembangunan diri yang sesuai dengan golongan usia mereka. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga tantangan yang dihadapi, baik oleh pihak masjid maupun setiap anggota masyarakat dalam membentuk jati diri Muslim (Anon, 2009: 4).

Institusi masjid menjadi "jantung dan nadi" masyarakat Muslim Singapura. Karena itu, masjid dibangun di setiap kompleks perumahan untuk memudahkan mereka menangani isu dan pembangunan sosi-agama umat. Saat ini di Singapura terdapat lebih dari 70 masjid.

Selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap persoalan agama, MUIS memiliki wewenang penuh terhadap manajemen institusi masjid, namun demikian, MUIS tidak turut campur secara nyata dalam aktivitas yang diselenggarakan oleh pihak masjid, melainkan hanya memantau aspek manajemen dan hal-hal penting saja (MUIS, 2005a: 14).

### ***Manajemen Madrasah, Masjid, dan LSM***

Lembaga pendidikan Islam (madrasah) dikelola secara modern dan profesional, dengan kelengkapan perangkat keras dan lunak. Dari seluruh madrasah Islam (sebanyak enam buah yang seluruhnya di bawah naungan MUIS), sistem pendidikan diterapkan dengan memadukan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keenam madrasah itu adalah *Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiah*, *Madrasah Al-Maarif Al-Islamiah*, *Madrasah Alsagoff Al-Islamiah*, *Madrasah Aljunied Al-Islamiah*, *Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah*, dan *Madrasah Wak Tanjong Al-Islamiah*.

Waktu penyelenggaraan belajar mengajar dimulai dari pukul 08.00 hingga 14.00. Lama waktu ini juga berlaku di sekolah-sekolah umum dan non-madrasah. Agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, maka di setiap madrasah dibangun laboratorium komputer dan internet, serta sistem pendukung pendidikan *audio converence*. Selain dilengkapi fasilitas internet, setiap madrasah juga mempunyai *server* tersendiri bagi pengembangan pendidikan modern. "Murid dibiasakan dengan teknologi,

terutama teknologi internet. Setiap hari, mereka diberi waktu dua jam untuk aplikasi dan pemberdayaan internet,” jelas Mokson Mahori, Lc, guru di madrasah Al-Junied Al-Islamiyah. Sayangnya, pendidikan Islam baru ada dalam institusi TK hingga madrasah Aliyah (SMU). Untuk perguruan tingginya hingga kini belum ada. Manajemen yang sama juga diterapkan dalam pengelolaan masjid.

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat Islam (LSM) juga tak kalah pentingnya dalam upaya menjadikan komunitas muslim negeri itu potret yang maju dan progresif. Berbagai LSM Islam yang ada terbukti berperan penting dalam agenda-agenda riil masyarakat Muslim.

Saat ini, tidak kurang dari sepuluh LSM, di antaranya adalah: *Association of Muslim Professional* (AMP), Kesatuan Guru-guru Melayu Singapura (KGMS), *Muslim Converts Association* (Darul Arqam), *Muhammadiyah*, *Muslim Missionary Society Singapore* (Jamiyah), *Council for the Development of Singapore Muslim Community* (MENDAKI), *National University Singapore* (NUS) *Muslim Society*, *Perdatus* (Persatuan Dai dan Ulama Singapura), *Singapore Religious Teachers Association* (Pergas), *Mercy Relief* (Center for Humanitarian), *International Assembly of Islamic Studies* (IMPIAN), dan Lembaga Pendidikan al-Qur'an Singapura (LPQS).

Seluruh lembaga dan sistem manajemen profesional ini ditujukan bukan saja pada terbentuknya kualitas Muslim dan komunitas Islam yang maju, moderat dan progresif, tetapi juga potret yang mampu berkompetisi dan meningkatkan citra Islam di tengah pemandangan global yang kurang baik saat ini. Model demikian inilah yang kini terus diperjuangkan agar Islam yang *rahmat* menjelma dalam kehidupan masyarakat Singapura.

### **Profesionalisme dalam Pengelolaan Zakat**

Dimensi perkembangan Islam lainnya yang menarik adalah terkait profesionalisme dalam pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZIS wakaf). Manajemen profesional dalam pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas umat bukan hanya terlihat pada pengelolaan pendidikan (madrasah), masjid, dan lembaga-lembaga swadaya Islam non-pemerintah (NGO). Profesionalisme tersebut juga tampak jelas dalam pengelolaan ZIS wakaf. Sebagaimana dijelaskan oleh kepala Divisi Pembangunan Agama dan Penelitian, Majelis

Ugama Islam Singapura (MUIS), Zalman Putra Ahmad Ali, pengelolaan ZIS wakaf, diperuntukkan bagi pemerataan dan kesejahteraan umat Islam. "Pemberdayaan amanat agama ini tidak akan mencapai target maksimal jika tidak dikelola secara profesional," kata Zalman.

MUIS sendiri sebagai lembaga tertinggi pemerintah untuk urusan agama Islam bertanggung jawab dan terlibat langsung dalam pengelolaan ZIS wakaf, sehingga dapat mengetahui secara pasti pelaksanaannya. Sistem manajemen profesional MUIS ini telah diterapkan lebih dari 15 tahun terakhir. Dalam pembayaran ZIS misalnya, tidak lagi secara manual, dengan cara pergi ke tempat penyaluran atau lembaga yang dipercaya, tapi sejak dua tahun terakhir pembayarannya dapat dilakukan melalui sistem online, seperti manajemen bank.

Dengan cara demikian akan diketahui seluruh dana yang terhimpun saat itu juga. Sementara untuk wakaf, telah 10 tahun lebih dikelola dengan sistem wakaf produktif. Harta benda dari wakaf dikelola dengan asas manfaat, bukan lagi untuk pembangunan masjid atau kuburan, sebagaimana di Indonesia. Misalnya, dana wakaf dipakai untuk pembangunan *real estate* atau *supermarket* atau usaha lainnya yang menguntungkan. Keuntungannya kemudian dipakai lagi untuk pengembangan Islam. Berkaitan dengan ZIS ini, menurut Zalman, rata-rata dana ZIS setiap tahunnya terkumpul berkisar 18-20 juta dolar Singapura (sekitar 10 juta dolar AS). Khusus pegawai di MUIS, digaji dari dana zakat tersebut.

Sementara itu, dana bagi pengembangan masjid dan madrasah, ada kasnya sendiri. Tidak lagi diambilkan dari dana ZIS wakaf tersebut. Untuk madrasah ada kotak bernama "Dana Madrasah". Sedangkan dana masjid diperoleh dari sumbangan kaum Muslim, khususnya kotak Jumat. Meski juga terkadang masih dapat bantuan dari dana ZIS wakaf.

### **Menjaga Kohesi Sosial di Tengah Pluralitas Agama**

Muslim Singapura secara politis tergolong minoritas yang hidup di tengah masyarakat plural, yang terdiri dari berbagai macam etnis, agama, dan budaya (Suzaina Kadir, 2004). Keanekaragaman pada umumnya tak jarang menyebabkan konflik di antara kelompok masyarakat bila tidak mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan baik. Seperti dikemukakan

Tarmizi Taher (1998: 59), perjumpaan antara yang berbeda, sering terjadi tidak secara akrab. Saling curiga yang berbuntut pada permusuhan dan konflik sering tak bisa dihindari.

Tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan-perbedaan ini—termasuk perbedaan agama—menjadi salah satu pembatas antar warga dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh sederhana, Muslim misalnya tidak akan makan di restoran China yang non-Muslim karena khawatir terkontaminasi oleh babi dan zat-zat lain yang haram dalam pandangan Islam.

Namun demikian, dalam konteks Singapura, Muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sekular dan multikultural, sampai tahap-tahap tertentu nampak mampu beradaptasi dan berintegrasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu contoh menarik adalah sikap Muslim pada acara jamuan makan dengan rekan-rekan sewarganya yang non-Muslim. Mengingat jumlah Muslim hanya 15% dari seluruh jumlah penduduk, maka jamuan makan bersama dengan rekan-rekannya yang non-Muslim menjadi sesuatu yang sulit dielakkan. Hal semacam ini bisa jadi menempatkan seorang Muslim pada kondisi yang rumit dan dilematis, terutama bila nilai-nilai dan ajaran agama Islam diperhadapkan dengan nilai-nilai dan praktik kosmopolitan. Mengingat Islam mengatur tentang makanan yang halal dan haram untuk dikonsumsi seperti *khamar*, anjing, babi, darah, dan bangkai yang diharamkan karena zatnya, juga ada makanan yang diharamkan karena suatu sebab yang bukan berkaitan dengan zatnya seperti daging hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Maka dalam kondisi semacam itu, pertanyaannya adalah apakah Muslim akan menghindari jamuan makan antar budaya tersebut, dan sikap apa yang mereka ambil dalam kondisi semacam itu? atau mereka mengatur strategi sehingga dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana mereka berada tanpa melanggar ajaran agama?

Berdasarkan hasil penelitian yang mewawancarai 20 orang warga Muslim yang dipandang saleh dan taat menjalankan agama, maka secara umum jawaban mereka adalah bukan menghindari jamuan makan tersebut dengan bersikap eksklusif dan menghindari interaksi antar budaya, melainkan mencari dan mengatur strategi mempertahankan diri untuk tetap patuh pada ajaran agama sementara tetap bergabung bersama mereka dalam interaksi sosial (Kamaludeen Mohamed Nasir, 2008).

Ini menunjukkan bahwa mereka nampak memiliki visi pluralisme dan wawasan multikultural yang ditandai dengan kesadaran dan pengakuan serta sikap menerima akan adanya keragaman. Hal ini terindikasi dari sikap dan pemikiran yang memberi tempat bagi kehadiran "*the other*" dalam pergaulan publik, adanya sikap toleran, saling menghargai, saling membantu, dan kemampuan bekerjasama dengan sesama.

Dalam contoh lain di mana azan tidak diperbolehkan menggunakan *loud speaker* misalnya, sikap mereka adalah menerima kebijakan tersebut dan sebagai solusinya azan diperdengarkan melalui radio. Penerimaan semacam ini merupakan wujud nyata dari sikap toleran mengingat adanya "*the other*" yang mengganggu karena suara azan tersebut. Selain itu, sikap toleran dan menghargai dari warga Muslim juga terlihat pada penerimaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang memindahkan komunitas Muslim—yang dulu tinggal di satu kampung sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan agama secara berjamaah—ke rumah-rumah susun yang di situ terintegrasi dan terasimilasi dengan non-Muslim.

Sikap penerimaan mereka juga terlihat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah. Solusi yang diambil kemudian adalah dengan mengoptimalkan dan mengintensifkan pembelajaran agama di masjid, madrasah, dan melalui LSM. Sikap semacam ini adalah wujud nyata dari visi pluralisme dan multikulturalisme. Sikap ini bukanlah berarti bahwa mereka mengalah dan lemah, tetapi dipandang sebagai artikulasi dari kesalehan dan pengamalan Islam. Seperti dikemukakan oleh Hussin Mutalib:

*...being Islamic indeeds also implies being loyal and patriotic to the country, and progressive and inclusive in dealing with fellow citizens. Muslim know very well that their religion requires them to live a live of moderation (ummatan wasathan), to confront all challenges and problems with hard work and wisdom (hikmah), to look to the future with optimism –and leave the rest to Him (tawakkal), hoping for a happy ending (husnul khatimah).*

Pandangan ini dan beberapa contoh kasus sebagai mana telah disebutkan di atas menggambarkan bahwa mereka memiliki visi pluralisme. Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan



merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sikap dan pandangan semacam ini bukan tanpa dasar. Karena konsep pluralisme agama sejak awal sudah ada dalam agama Islam. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya pluralisme agama. Agama Islam adalah agama damai yang sangat menghargai, toleran, dan membuka diri terhadap pluralisme agama. Islam, sebagai agama yang mengemban misi *rahmatan lil alamin* memandang pluralisme atau keragaman dalam beragama adalah sebuah aturan Tuhan (*sunnatullah*) yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari, tetapi sebaliknya harus diterima oleh semua umat manusia. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan.

Isyarat-isyarat tentang pluralisme agama sangat banyak ditemukan di dalam al-Qur'an, antara lain firman Allah "*Untukmu agamamu dan untukku agamaku*" (QS. al-Kafirun/109: 6). Pluralisme agama merupakan perwujudan dari kehendak Allah Swt. Allah tidak menginginkan hanya ada satu agama walaupun sebenarnya Allah punya kemampuan untuk hal itu bila Ia kehendaki. "*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu*" (QS. Hud/11: 118).

Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Air Singapura yang juga mengurus masalah warga Muslim, Dr. Yaacob Ibrahim melukiskan kemampuan adaptasi dan integrasi Muslim di tengah pluralitas Singapura sebagai berikut: "komunitas Muslim Singapura selalu merasa sebagai bagian dari bangsa Singapura." Menurutnya, keberhasilan warga minoritas Muslim untuk berintegrasi tidak lepas dari kebijakan pemerintah negara itu yang meskipun memberlakukan undang-undang sekular, tapi tetap menghormati hak-hak wargaminoritas, termasuk umat Islam ("Singapura, Negara Bebas Islamophobia", *Era Muslim*, 10-05-2005).

Sebagai contoh, sejak tahun 1975, pemerintah membuat kebijakan yang memberi peluang bagi Muslim memanfaatkan sistem pemerintahan untuk memotong gaji masing-masing pekerja Muslim sebanyak 50 sen atau satu dollar per bulan sebagai donasi untuk pembangunan masjid dan penyediaan

sarana dan pra sarana serta peralatan modern lainnya untuk keperluan masjid (MUIS, 1986: 5). Kebijakan untuk biaya pembangunan masjid ini dikenal dengan *Mosque Building Fund* (MBF), yaitu 'Tabung Pembinaan Masjid' atau 'Dana Pembinaan Masjid' (DPM) (MUIS, 1986: 5; Ezad Azraai Jamsari, 2010: 34).

Salah satu fenomena yang menarik terkait Masjid dan upaya menjaga kohesi sosial di tengah kehidupan multikultural Singapura adalah yang ditampilkan dan diperankan oleh *Harmony Centre Masjid An-Nahdhah*.

### ***Harmony Centre Masjid An-Nahdhah***

Di Masjid An-Nahdhah terdapat *Harmony Centre* yang digagas oleh MUIS untuk mempromosikan dan mendorong terwujudnya masyarakat Singapura yang saling memahami dan menghormati keanekaragaman ras dan agama mereka. Para pengunjung disugahi rangkaian informasi tertulis, bergambar, dan audio-visual tentang Islam dari berbagai aspek. Di Pusat Harmoni ini, pokok-pokok ajaran, sejarah, maupun kontribusi Islam dan penganutnya pada peradaban dunia dapat diketahui hanya dalam kurun waktu kurang dari satu jam.

Seperti dikatakan Mohamed Ali bin Atan, Kepala Pusat Harmoni Masjid An-Nahdhah, "Kalau ada orang yang ingin tahu tentang Islam di Singapura, mereka datang ke masjid ini. Banyak pengunjung Pusat Harmoni mengaku cukup belajar tentang Islam dalam 45 menit,". Sejak berdiri tahun 2006, jumlah pengunjung Pusat Harmoni sudah mencapai sedikitnya 24.533 orang dan 92 persen di antaranya adalah non-Muslim. Di antara para pengunjung non-Muslim itu adalah seorang Kristiani dari Kampong Kapor bernama Rev. Gabriel Liew. Ia yang berkunjung ke Pusat Harmoni pada 28 Agustus lalu 2011 ini menuliskan kesan positifnya tentang keberadaan Pusat Harmoni ini di buku tamu masjid. "Kami sangat terinspirasi oleh inklusivitas dan progresivitas anda pada keyakinan dan komitmen pada terciptanya kehidupan antar penganut beragam agama yang harmonis," tulisnya.

Para pengunjung seperti Rev. Gabriel Liew ini berkesempatan mendapatkan gambaran yang relatif lengkap tentang "wajah" Islam moderat, peradaban Islam, esensi Islam, serta seni-gaya hidup Islami. Semua informasi itu dikemas secara apik dan didukung pula oleh eksibisi aneka koleksi al-Qur'an



dan barang seni-budaya Islam, seperti tembikar, aneka kopian, dan kaligrafi.

Bersama sejumlah remaja Muslim yang membantunya, Mohamed Ali menerangkan kepada para pengunjung Pusat Harmoni setiap rangkaian informasi yang ada di lantai satu dan dua gedung masjid sebelum mengajak mereka ke ruang auditorium masjid. Di lantai satu, para pengunjung disuguhkan dengan informasi tentang sikap Islam terkait dengan keberagaman agama dan dukungan Islam pada terwujudnya kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Di lantai yang sama, selain informasi tentang Islam, terdapat pula aneka informasi yang membangun sensitivitas antar umat beragama di Singapura terhadap keberadaan agama dan kepercayaan lain, seperti Kristen, Hindu, Baha'i, Budha, Jainisme, Judaisme, Sikhisme, Taoisme, dan Zoroastrianisme. Bagi para pengunjung non-Muslim yang tertarik pada sejarah Islam, mereka mendapatkan informasi tentang perjalanan historis mulai dari era Nabi Muhammad SAW hingga Abad ke-19.

Di seksi Islam dan Peradaban, para pengunjung dapat membaca tentang kontribusi Islam dan ilmuwan Muslim pada perkembangan sains dan peradaban dunia, seperti Ibnu Sina, Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi, dan Koca Mimar Sinan Agha. Selain itu juga ditampilkan pula informasi tentang sumbangsih dan pencapaian sejumlah tokoh dan ilmuwan Muslim Singapura pada pengembangan masyarakat negara itu.

Di Pusat Harmoni Masjid An-Nahdhah yang pembiayaan seluruh kegiatannya hampir sepenuhnya berasal dari sumber-sumber keuangan non-pemerintah di bawah pengelolaan MUIS ini, kalangan non-Muslim di Singapura mengenal wajah Islam moderat dengan cepat. Inilah salah satu upaya masyarakat Muslim negara itu menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan agama, antara lain ditunjukkan dengan upaya pemberian pemahaman dan pengertian antar umat beragama sehingga diharapkan tercipta *peace and harmony* serta *mutual understanding* antar umat beragama.

## Islam, Pluralitas dan Sekularitas dalam Konteks Singapura

Singapura dikenal sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya negara sekular. George Yeo, menteri informasi, komunikasi dan seni menegaskan: "Singapore's government is secular, but it is certainly

*not atheistic*" (Lily Zubaidah Rahim, 2009: 2). Pandangan ini menggambarkan tentang paham sekularisme strategis pemerintah, yang menegaskan bahwa sekular bukan berarti atheis (tidak bertuhan) karena faktanya lebih dari 80% penduduk Singapura menganut agama tertentu.

Paham sekularisme strategis pemerintah tercermin dari kebijakan negara dalam melakukan intervensi dalam urusan administrasi agama Islam, Sikhisme, dan Hindu. Kenyataan ini dapat ditunjukkan dari banyaknya institusi atau badan yang didirikan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek tentang pelaksanaan agama (Yan, 2007). Dalam kaitannya dengan agama Islam, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) menjadi contoh yang relevan. Melalui MUISlah pemerintah membuat kebijakan pelarangan azan menggunakan *loud speaker*. Selain itu, intervensi pemerintah juga dapat dilihat pada kebijakan sertifikasi ulama.

Singapura memang negara kecil, dan tidak sulit bagi pemerintah untuk mengontrol mobilitas rakyatnya. Meski begitu, pemerintah Singapura tetap menerapkan kebijakan yang sangat hati-hati, khususnya terhadap Islam dan umat Islam. Gerak-gerik umat Islam selalu diawasi pemerintah. Bukan hanya ulamanya, tetapi juga jemaahnya. Untuk mengontrol dan mengawasi para ulama, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi ulama. Hanya ulama yang memiliki sertifikat (*tauliah*) saja yang dapat menyampaikan khutbah, memberikan ceramah maupun kajian, baik di masjid maupun di tempat terbuka. Bagi yang tidak memiliki sertifikat, meski diakui keilmuan dan kualifikasinya, tetap tidak bisa memberikan ceramah di muka umum. Selain itu, tidak seperti di Indonesia, di mana ulama dapat menyampaikan pandangan keagamaan dan hasil ijtihadnya, di Singapura naskah khutbah Jumat disediakan oleh MUIS. Mereka hanya diperbolehkan membaca naskah khutbah yang disediakan (Lily Zubaidah Rahim, 2009: 3). Jika mereka melanggar, sertifikatnya dapat dicabut, bahkan dapat diijerat dengan undang-undang *Internal Security Act* (ISA).

Selain itu, di setiap masjid dan sentra aktivitas Muslim juga diawasi oleh intel atau *Special Branch* (SB). Kamera CCTV pun di pasang termasuk di dalam masjid, untuk mengawasi aktivitas Muslim dan memonitor isi khutbah atau kajian yang disampaikan. Kebijakan pemerintah sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah dalam rangka

mencegah ajaran Islam yang radikal (deradikalisasi) dan memastikan stabilitas sosial. Negara Singapura yang kecil, dengan warganya yang multikultural dan multi agama, dengan minoritas Muslim dikelilingi oleh negara mayoritas Muslim, Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam, membuat negara ini selalu sensitif dalam mengelola hubungan etnis dan agamanya.

Karena itu, menurut Thio (2007), ironis bila sementara dalam Akta Pemeliharaan Keharmonisan antar Agama (*Maintenance of Religious Harmony Act/ MRHA*) menuntut agar urusan agama dipisahkan dari persoalan politik, dalam faktanya sikap pemerintah masih saja mengaitkan urusan agama dan kebijakan publik.

Seiring dengan fenomena semacam ini, pengertian tentang Singapura sebagai negara sekular, oleh Pereira (2005: 161-178) dijelaskan sebagai berikut:

*“Singapore is officially a secular society. This does not mean that the practice of religion is disallowed; instead, Singapore is secular in so far as there is no official state religion, and the constitution state very clearly that religion is private issue which must be kept separate from politics”.*

Tidak mudah untuk menebak bagaimana sesungguhnya *grand design* pemerintah dalam menempatkan Islam dan agama-gama lain dalam kebijakan politiknya serta sejauhmana sikap sekular negara dan pemerintah dalam membuat kebijakan. Namun, jika kita menggunakan kebijakan pemerintah itu sendiri, untuk melihat *grand design* mereka terhadap Islam, maka terlihat bahwa pemerintah tidak serius dan tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sekularisme, di mana negara menjadi netral dalam permasalahan agama; tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama; tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur agama setiap individu. Karena sikap sekular yang mereka tunjukkan lebih cenderung bersifat ambivalen dan *double standard*. Di satu sisi, warga negara tidak dibenarkan mengaitkan agama dengan politik, namun pada hal-hal tertentu pemerintah justru mengatur dan mengintervensi pengamalan agama melalui lembaga-lembaga resmi seperti MUIS dan Mendaki, dan organisasi-organisasi lain yang dibentuknya. Dengan kata lain, sikap sekularisme pemerintah penuh perhitungan. Artinya meskipun di satu sisi, pemerintahan ingin menjadikan masalah

agama sebagai masalah pribadi, tetapi di sisi lain, pemerintah nampak tetap mengendalikan aktivitas keislaman agar tidak mengarah pada apa yang mereka bahasakan dengan “Islam fundamentalis” dan agar keharmonisan antar umat beragama tetap terjaga.

Di sisi lain, kondisi Muslim Singapura yang minoritas dan hidup di tengah sistem sekular ternyata tidak membuat komitmen keagamaan dan pengamalan Islam mereka menjadi surut. Mereka mampu merespon kondisinya secara realistis dan mengkontekstualisasikan keberagamaan mereka sesuai masalah sosial dan kondisi kekinian yang mengalami lajunya proses modernisasi. Meskipun pemerintah nampaknya menyimpan kekhawatiran bahwa agama akan menjadi penghalang proses modernisasi, sehingga cenderung menegaskan bahwa negara menganut paham sekularisme.

Bila dilihat pada konteks pengalaman Barat, sekularisasi memang dipahami sebagai sebuah prasyarat mutlak untuk melakukan perubahan sosial dan modernisasi. Banyak bangsa-bangsa Islam seperti Syria, Libanon, dan Turki telah terjebak dalam cara berpikir seperti itu. Tetapi belakangan, seiring dengan kegagalan Barat, banyak pemikir Muslim kemudian tercerahkan dan terbebas dari dominasi persepsi Barat ini, dan mereka menyerukan gerakan kembali kepada otentisitas Islam. Albert Hourani melukiskan upaya kembali kepada Islam ini:

*“It is becoming evident that Arab-Muslim intelligentsia feel and argue that an Islamic meaning to modern society is feasible, that Islamic solutions to objective contemporary problems are possible”* (Moeflich Hasbullah, 2003: 8-9).

Agaknya pandangan semacam ini pula yang diilhami oleh intelektual Muslim Singapura, bahwa sekularisasi bukanlah prasyarat mutlak untuk melangsungkan proses modernisasi. Sebaliknya, religiusitas perlu diperkuat dalam menghadapi gelombang cepat modernisasi di negaranya. Untuk itu, perlu adaptasi dan penyesuaian diri, sehingga mereka dalam hal ini menemukan bentuk pengamalan agama yang sesuai dengan konteks politik dan sosial-budayanya (Jamhari, Ma'ruf, <http://www.ditperta.net>). Seperti dikemukakan dalam buku *Risalah Membangun Masyarakat Islam Singapura* (2005b: 3), yang dipublikasikan oleh MUIS:

Faktor-faktor luaran, seperti keadaan geopolitik dan hakikat kehidupan sosial, mempunyai kesan yang kuat untuk memaksa perubahan di dalam

cara kita memahami dan mengamalkan agama... Kecemerlangan tidak akan tercapai sekiranya kita menantikan perubahan itu berlaku dengan sendirinya, kerana ia mungkin mengambil haluan yang tidak kita inginkan. Sebaliknya, kita harus menyahut baik cabaran ini dengan cara yang proaktif, dan berani melakarkan gaya kehidupan keagamaan yang bersesuaian dengan keadaan kita tersendiri. Di dalam melaksanakan usaha ini, kita perlu akur dengan beberapa realiti kehidupan kontemporari bagi masyarakat Islam Singapura.

Pandangan sebagaimana dikemukakan di atas membuat Islam di Singapura menemukan identitinya (bentuk pengamalan agama) dan formulasi respon terhadap tantangan modernitas dan sekularitas negara sesuai dengan konteks lokalnya. Formulasi respon tersebut secara implisit tergambar pada etos sepuluh ciri masyarakat Islam cemerlang yang mereka rumuskan sebagaimana berikut ini:

1. Berpegang teguh pada prinsip Islam dan dapat menyesuaikan diri dengan konteks yang berubah.
2. Menghayati peradaban dan sejarah Islam dan berupaya memahami isu-isu kontemporer.
3. Menghargai peradaban lain, percaya diri untuk berinteraksi dan bersedia belajar dari masyarakat lain.
4. Mempunyai moral yang tinggi dan sifat kerohanian yang utuh serta mampu mengatasi tantangan kehidupan masyarakat modern.
5. Progresif, mengamalkan Islam lebih sekadar ritual/bentuk dan dapat menyesuaikan diri dengan arus modernisasi.
6. Dapat menyesuaikan diri sebagai golongan yang memberi sumbangan dalam masyarakat multikultural dan negara sekular
7. Tidak menyisihkan diri dan menerima kehidupan plural tanpa mengabaikan prinsip dan nilai.
8. Percaya bahwa Muslim yang baik adalah rakyat yang baik.
9. Membawa kesejahteraan kepada semua dan menggalakkan nilai dan prinsip universal.
10. Menjadi contoh dan inspirasi buat semua (Office of Mufti Majelis Ugama Islam Singapura, 2005).

Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu, ajaran dan peradaban Islam di kalangan Muslim Singapura tetap eksis dan terpelihara.

Islam dijadikan sebagai sebuah penawar dari proses disorientasi dan dislokasi serta sebagai saluran arus balik dari semua bentuk gaya hidup dan ideologi sekular di era modern. Pembaharuan (*renewal*) dan kebangkitan Islam di kalangan mereka, dengan demikian, dapat dilihat sebagai sebuah penyimpangan modernisasi sebagaimana diungkapkan oleh Peter L. Berger bahwa modernisasi tidak selalu diikuti oleh proses sekularisasi.

Mengapa modernisasi di masyarakat-masyarakat Muslim tidak diikuti oleh proses sekularisasi? Karena Islam telah memerankan diri tidak sebagai penghambat kemajuan bahkan pendorong modernisasi itu sendiri sehingga tidak perlu “dibuang” dalam proses pembangunan. Islam adalah sebuah doktrin lentur dan elastis yang bisa wujud dalam bentuk masyarakat apapun. Fleksibilitas inilah yang telah membuat Islam bertahan dan selalu hadir dalam berbagai bentuk masyarakat dan gelombang perubahan sosial. Islam bisa hadir dalam wujudnya yang paling konservatif dan tradisonal sekaligus yang paling modern dan liberal (Moeftlich Hasbullah, 2003: 11).

Dalam konteks modernisasi, Islam telah berperan penting sebagai “*spiritual bodyguard*” atas kepahitan-kepahitan pembangunan dan alienasi masyarakat modern. Fungsi-fungsi inilah yang telah diperankan Islam sebagai agama. Secara sosiologis, interaksi antara modernisasi dan sistem nilai Islam dalam masyarakat-Muslim tidak mengeliminasi nilai-nilai agama, atau membuat orang Islam jadi sekular. Yang terjadi justru sebaliknya, bukan tersekularkan, melainkan –sebagaimana kita lihat pada pengalaman Singapura–modernisasi telah memperkokoh institusi-institusi dan layanan keagamaan. Dengan kata lain, kemajuan atau pembangunan dalam masyarakat Islam tidak otomatis menyebabkan mereka menjadi sekular.

Hal ini semakin menguatkan tesis bahwa dalam konteks masyarakat-masyarakat Muslim, sekularisasi pada kenyataannya tidak pernah terjadi dan bahkan sebaliknya menjadi pendorong kebangkitan keagamaan itu sendiri. Ernest Gellner (1992: 18) menyebut Islam sebagai “*the great exception to secularisation*”. Islam, kata Gellner, “*totally and effectively defies the secularisation thesis*”. Dengan kata lain, ketimbang menggiring pada proses sekularisasi, modernisasi justru telah menjadi fasilitator dan pendorong membuihnya busa-busa spiritual masyarakat Islam termasuk di Singapura.

## Catatan: (Endnotes)

1 Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. adalah Dosen pada Fakultas Tarbitah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau.

## Daftar Referensi

Amin, Ahmad. (1975). *Fajrul Islam*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah.

Anon. (2009). "Melayu Singapura Miliki Kedudukan Istimewa". *Kosmo*. 21 Juni 2009.

Azyumardi Azra. (1994). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.

Azyumardi Azra. *Muslim dan Masyarakat Multikultural*. <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1574-muslim-dan-masyarakat-multikultural.html>. diunduh tanggal 13 September 2013.

Ezad Azraai Jamsari. (2010). "Peranan dan Sumbangan Institusi Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Melayu-Islam di Singapura" dalam *Journal of Islamic and Arabic Education*. 2(2). 2010.

Furnival, J.S. (1994). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. New York: Macmillan.

Gellner, Ernest. (1992). *Postmodernism, Reason, and Religion*. London and New York: Routledge.

"Geopolitik dan/Geostrategi Singapura" <http://nhytataky.wordpress.com/201105/06/geopolitik-geostrategi-singapura>, diunduh pada tanggal 13 Oktober 2013.

Hasan, Ibrahim Hasan. (t.th.). *Tarikh al Islam al Siyasi wa al Dini wa al Tsaqafi wa al-Ijtima'i*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah.

Hefner, Robert W. (ed.). (2001). *The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Honolulu: University of Hawai.

Helmiati. (2011). *Sejarah Islam Asia Tenggara*. Pekanbaru: Zanafa Publishing kerjasama dengan Nusa Media Bandung.

"Hijab Ban Set to Alienate Muslim in Singapore", *Islam Online-net*. <http://www.ummah.com/forum/showthread.php?28374-Hijab-Ban-Set-To-Alienate-Muslims-In-Singapore>. Diunduh

pada tanggal 3 September 2013.

Hooker, M.B. (1988). *Islam in South-East Asia*. Leiden: E.J.Brill.

IMD. (2013). *World Competitiveness Year Book Ranking 2013*.

Jamhari Ma'ruf. *Pendekatan Antropologi dalam Kajian Islam*. Artikel pilihan Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI. (<http://www.ditperta.net>).

Kamaludeen Mohamed Nasir, dkk. (2010). *Muslims in Singapore: Piety, Politics and Policies*. New York: Roudledge.

Kamaludeen Mohamed Nasir. (2008). *Defensive Dining: Notes on the Public dining experiences in Singapore*. Singapore: Departement of Sociology. Published online: 8 February 2008.

Lily Zubaidah Rahim. (2009). *Governing Islam and Regulating Muslims in Singapore's Secular Authoritarian State*. Perth, Western Australi: Murdoch University and Asia Research Centre.

Madeley, John T. S. and Zsolt Enyedi. (2003). *Church and State in Contemporary Europe: the Chimera of Neutrality*. Routledge.

Moeflich Hasbullah (ed.). (2003). *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media.

Mohamed Ali Atan. (2005). "Pengurusan Masjid: Pengalaman Republik Singapura". Kertas kerja Konvensyen Masjid 2005. Anjuran Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS), Singapura. 2-3 Ogos. MUIS. *New Generation Mosque In Singapore and Their Activities*.

MUIS. (1986). *New Generation Mosque In Singapore and Their Activities*. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura.

MUIS. (2005a). *Annual report 2005*. Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura.

MUIS. (2005b). *Risalah Membangun Masyarakat Islam Cemerlang Singapura*. Singapura: MUIS.

Office of Mufti Majelis Ugama Islam Singapura. (2005). *Risalah for Building A Singapoe Muslim Community of Excellent*. second edition. Singapore: MUIS.



- Pereira, Alexius A. Religiosity and Economic Development in Singapore. (2005). *Journal of Contemporary Religion*. Volume 20, No.2. 2005.
- Rizki Ridyasmara. (2005). *Singapura Basis Israel Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Singapore Economic Development Board. (2012). *Singapore: Fact and Rankings*.
- "Singapura. Negara Bebas Islamophobia". *Era Muslim*. 10-05-2005.
- Suriani Suratman. (2004). "Problematic Singapore Malays: The Making of Potrayal". Paper for International Symposium on Thinking Malayness organised by Research Institute for Language and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies. 19-21 June 2004.
- Suzaina Kadir. (2004). "Islam, State, and Society in Singapore". *Inter-Asia Cultural Studies*. Vol. 5 Number 3. 2004.
- Tan, Eugene K.B. (2007). 'Norming, "Moderation" in an Iconic Target: Public Policy and the Regulation of Religious Anxieties in Singapore.' *Terrorism and Political Violence*. Vol.19. 2007.
- Tarmizi Taher. (1998). *Menuju Ummatan Wasathan, Kerukunan Beragama di Indonesia*. Jakarta: PPIM.
- Tourres, Marie-Aimée. (2003). *The Politics of Multiculturalism, Review Southeast Asia*. IIAS Newsletter. Leiden: 30 Maret 2003.
- The World Bank. (2012). *Doing Business 2012 Report*. Washington DC.
- The World Economic Forum. (2012). *The Global Competitiveness Report 2011-2012*.
- Thio, Li-ann. (2007). *Secularism, the Singapore Way*. Straits Times. 30 Oktober 2007.
- Website Majelis Ugama Islam Singapura. <http://www.muis.gov.sg/cms/aboutus/default.aspx>. di unduh pada tanggal 16 Agustus 2013.
- Weyland, Petra. "International Muslim Networks and Islam in Singapore" dalam *Journal SOJOURN, Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 5 Number 2.